

Pengaruh PAD, DAK Dan DBH Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Langsung Di Kabupaten Merangin

Selamet Edi Sucipto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YA Bangko, 96selamet@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is 1) To analyze the effect of PAD, DAK and DBH on Direct Expenditure in Merangin District during 2001-2015. 2) To analyze the effect of PAD, DAK, and DBH on Economic Growth through Direct Spending in Merangin District during 2001-2015. Based on result of research by using path analysis and using multiple linier regression analysis, using 2 (two) equation that is 1) Influence of PAD, DAK and DBH to Direct Shopping. 2) Effect of PAD, DAK, DBH and Direct Spending on Economic Growth. From the result of path analysis for the first equation that has been done, it can be concluded that able to influence direct expenditure is DAK variable, while PAD and DBH have no effect to direct expenditure. DAK has a positive influence on direct expenditure. Direct DAK can have a big and positive impact on direct expenditure, whereas if the indirect effect of DAK on direct expenditure through PAD and DBH can have a positive effect but the effect is more keil compared to the direct influence of DAK on direct expenditure in Merangin District. From result of path analysis for second equation which have been done hence can be drawn conclusion able to influence economic growth through direct expenditure is variable of DAK and DBH, while PAD has no effect to economic growth. DAK, DBH and direct expenditure have a positive influence on economic growth. Direct DAK, DBH and direct expenditures have a big and positive impact on economic growth, while the indirect effect of DAK and DBH on economic growth through direct expenditure is less than direct influence of DAK and DBH on economic growth.

Keyword: PAD, DAK, DBH, Direct Spending and Economic Growth.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi menjadi Pembangunan nasional adalah tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran rakyat suatu Negara. Semakin besar tingkat pembangunan suatu Negara mengindikasikan Negara tersebut semakin maju dan berkembang. Konteks pembangunan nasional merupakan salah satu aspek yang masuk dalam teori makro ekonomi. Tinggi rendah angka pembangunan dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Pertumbuhan ekonomi meliputi segenap aktivitas produksi barang dan jasa dalam periode tertentu dan menentukan angka pendapatan nasional suatu Negara serta kesejahteraan masyarakatnya (Putro, 2010). Indonesia dalam lingkup yang lebih spesifik merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari banyak daerah. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang baik adalah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi adalah salah

satu daerah dengan sektor pertambangan dan penggalian sebagai tulang punggung utama dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dikalkulasi serta diprediksikan melalui besaran angka yang tercantum dalam Tabel produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB diartikan sebagai totalitas dari akumulasi barang dan jasa yang dihasilkan daerah pada siklus perekonomiannya. PDRB atas dasar harga konstan dijadikan acuan dalam mengkalkulasi angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemerintah daerah memacu angka pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan pemberdayaan segenap sumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama pada masyarakat (sebagai investor dan/atau pekerja) guna memperluas kesempatan kerja. Pembangunan asset tetap di bidang infrastruktur, jalan raya, airport, transit, sistem saluran air, dan lainnya sarana publik lainnya sangat berkontribusi besar terhadap tingkat produktivitas. Tingkat pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode 2011-2014 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi Jambi (2011-2014)

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
Kerinci	6,21	7,51	6,34	9,63	7,42
Merangin	7,25	6,37	6,49	6,95	6,77
Sarolangun	9,67	9,93	9,04	8,86	9,38
Batang Hari	9,54	8,35	6,43	8,02	8,09
Muaro Jambi	8,41	7,23	7,11	8,23	7,75
Tanjung Jabung Timur	7,36	2,78	4,44	5,92	5,13
Tanjung Jabung Barat	7,64	4,95	5,78	6,51	6,22
Tebo	9,07	7,71	7,33	9,28	8,35
Bungo	9,74	9,65	9,44	6,35	8,80
Kota Jambi	7,79	7,63	8,27	6,64	7,58
Kota Sungai Penuh	6,86	7,09	7,81	6,35	7,03
Rata-rata	8,14	7,20	7,13	7,52	7,50

Sumber : BPS Propinsi Jambi

Berdasarkan tabel 1. diatas, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi selama tahun 2011 sampai tahun 2014 yang tertinggi tercatat pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,14 persen. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011-2014 adalah sebesar 7,50 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya terbesar terjadi pada kabupaten Sarolangun dengan rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 9,38 persen. Kabupaten merangin merupakan salah satu dari tiga kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah. Selama tahun 2011 sampai tahun 2014, rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin yaitu 6,77 persen. Permasalahannya adalah sektor terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Merangin berasal dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor ini menjadi penyumbang besarnya sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Jambi. Seharusnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin mampu untuk lebih unggul dibanding pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Kebijakan otonomi daerah membutuhkan modal yang besar guna merealisasikan pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi. Belanja daerah dalam konteks pertumbuhan

ekonomi berfokus pada anggaran belanja modal. Belanja modal sebagai bagian dari belanja yang dilakukan oleh daerah. Anggaran belanja modal adalah satu kesatuan elemen belanja yang terkandung di dalam belanja langsung. Belanja langsung adalah salah satu dari dua bagian utama belanja daerah selain belanja tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan belanja modal terletak pada luas lingkungannya, di mana belanja langsung mencakup aspek yang lebih luas, sedangkan belanja modal lebih sempit.

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja modal adalah bagian belanja langsung yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi, karena secara spesifik berfokus pada pembangunan aset tetap. Aset tetap merupakan kekayaan pemerintah daerah yang akan memiliki umur ekonomis jangka panjang dengan asumsi akan memberikan pendapatan di masa yang akan datang. Penelitian Yovita (2011) membuktikan bahwa PDRB mampu memengaruhi belanja langsung secara positif. Selanjutnya Sumarthini dan Yasa (2015) menyatakan PAD terbukti memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Untuk melihat proporsi belanja langsung Kabupaten Merangin dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi dapat kita lihat melalui tabel proporsi realisasi belanja langsung periode 2013-2014 dapat dilihat pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 2. Proporsi Realisasi Belanja Langsung di Kab/Kota di Prov Jambi Tahun 2013-2014

Kabupaten/Kota	2013		2014		Rata-rata Proporsi (%)
	Realisasi (Rp.000.000)	Proporsi (%)	Realisasi (Rp.000.000)	Proporsi (%)	
Kota Jambi	476.068	8,75	587.999	9,76	9,26
Kota Sungai Penuh	377.990	6,95	355.839	5,91	6,43
Merangin	403.215	7,41	412.864	6,86	7,13
Kerinci	350.167	6,43	394.332	6,55	6,49
Batang Hari	423.506	7,78	508.215	8,44	8,11
Bungo	512.105	9,41	521.613	8,66	9,04
Muaro Jambi	541.297	9,95	599.570	9,96	9,95
Sarolangun	444.833	8,17	498.022	8,27	8,22
Tanjung Jabung Barat	877.412	16,12	981.190	16,29	16,21
Tanjung Jabung Timur	625.899	11,50	668.322	11,10	11,30
Tebo	409.837	7,53	493.808	8,20	7,87
Total	5.442.329	100	6.021.774	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2015

Dapat kita lihat pada tabel 2, terlihat bahwa proporsi belanja langsung Kabupaten Merangin selama tahun 2013 dan tahun 2014 termasuk proporsi terendah setelah kota sungai penuh dan Kabupaten Kerinci dibandingkan proporsi belanja langsung kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Jambi dengan proporsi belanja langsungnya hanya sebesar 7,13 persen. Kemungkinan rendahnya pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja langsung di Kabuapten Merangin.

Kabupaten Merangin dalam perkembangannya terus mengalami peningkatan dalam pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah kabupaten Merangin selama tahun 2011-2014 mampu mengalami peningkatan terus menerus, pada tahun 2011 pendapatan daerah Kabupaten Merangin sebesar Rp 889.340.690.446,59 dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1.039.099 juta. Peningkatan pendapatan ini disumbang oleh peningkatan beberapa komponen pendapatan daerah, diantaranya PAD, DAK dan DBH. PAD pada tahun 2014 sebesar Rp 67.200 juta kemudian dana perimbangan berbentuk DAK sebesar Rp 49.331 juta dan dana transfer pemerintah provinsi berupa dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 85.451. Permasalahan yang terjadi di lingkungan pemerintah Kabupaten Merangin saat ini yaitu seiring bertambahnya anggaran belanja daerah Kabupaten Merangin namun tidak

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Selain itu, sumber pendapatan daerah lainnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengertian DAK menurut PP 55/2005, Pasal 1 adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK merupakan transfer dana yang bersifat spesifik, yaitu untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (*specific grant*).

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Sukirno, 2015). Dalam konteks penelitian ini pertumbuhan ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan daya beli masyarakat dan peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang dipengaruhi oleh perubahan pendapatan daerah yang ditinjau dari PAD, DAK dan DBH.

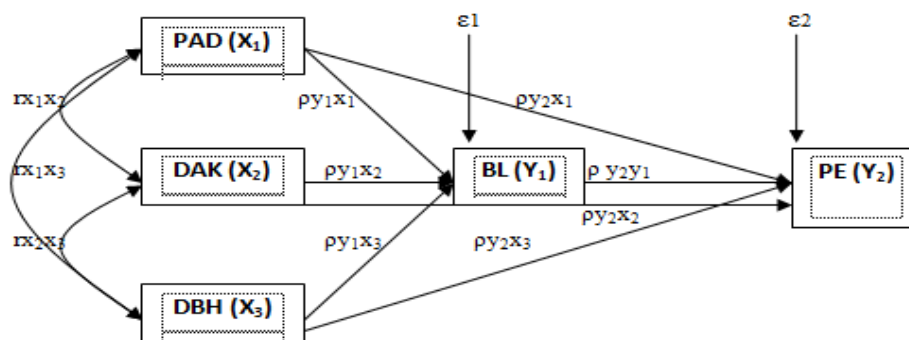
METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (*time series*) tahunan dari tahun 2001-2015. Data bersumber dari laporan Merangin dalam angka dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dalam proses penelitian ini, model analisis data yang digunakan adalah model analisis jalur (*path analysis*), sehingga penulis dapat mempresentasikan permasalahan dalam bentuk gambar dan menentukan persamaan struktural yang menyatakan hubungan antar variabel pada diagram jalur tersebut. Diagram jalur digunakan untuk menghitung pengaruh secara langsung (*direct*

effect) dan pengaruh tidak langsung (indirect effect) dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, pengaruh-pengaruh itu tercermin dalam apa yang disebut koefisien jalur, dimana secara matematik analisis jalur ini mengikuti model struktural. (Juliansyah, 2014). Model analisis jalur (path analysis) juga tetap menggunakan persamaan regresi, persamaan dasar dapat dituliskan sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$Y = \alpha + X_1 + X_2 + X_3 + \varepsilon_i$$

Kemudian, model analisis diatas dapat diaplikasikan berdasarkan pada diagram berikut:



Gambar 1. Analisis Jalur Path

Model diagram pada gambar 1 diatas menunjukkan bahwa X1, X2 dan X3 secara bersama-sama berpengaruh secara langsung terhadap Y1 berpengaruh terhadap Y2. Model ini menggambarkan dua struktur yang menyatakan ada dua kejadian sebab akibat yang akhirnya mengakibatkan satu kejadian yaitu Y2. Berdasarkan gambar 3.1. terdapat 2 persamaan struktural yaitu :

Persamaan struktural pertama :Pengaruh langsung PAD, DAK dan DBH terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Merangin untuk permasalahan pertama

$$Y_1 = \alpha + py_{1x1}X_1 + py_{1x2}X_2 + py_{1x3}X_3 + py_{1\epsilon1}$$

Keterangan :

- α = Konstanta
- Y_1 = Belanja Langsung
- X_1 = PAD
- X_2 = DAK
- X_3 = DBH
- ϵ_{i1} = Koefisien Pengganggu

Model persamaan menunjukkan pengaruh langsung variabel eksogen yaitu PAD (X1), DAK (X2) dan DBH (X3) terhadap variabel endogen Belanja Langsung (Y1) dengan galat ϵ_1 .

Persamaan struktural kedua : Model analisis pengaruh tidak langsung variabel eksogen PAD, DAK dan DBH serta pengaruh langsung Belanja Langsung terhadap variabel endogen Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Merangin untuk permasalahan kedua.

$$Y_2 = \alpha + \beta_{Y_2X_1}X_1 + \beta_{Y_2X_2}X_2 + \beta_{Y_2X_3}X_3 + \beta_{Y_2Y_1}Y_1 + \beta_{Y_2\epsilon_2}\epsilon_2$$

Keterangan :

α	= Konstanta
Y_2	= Pertumbuhan Ekonomi
Y_1	= Belanja Langsung
X_1	= PAD
X_2	= DAK
X_3	= DBH
ϵ_2	= Koefisien Pengganggu

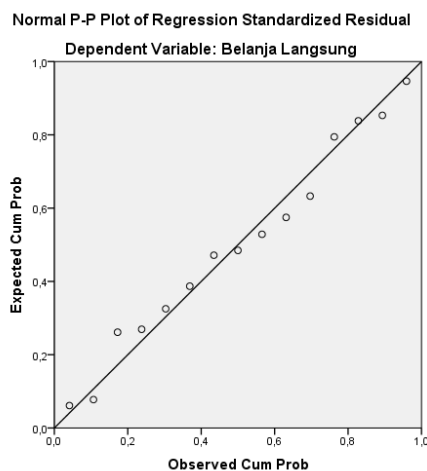
Model persamaan 3.3 diatas menunjukkan pengaruh secara langsung variabel eksogen PAD (X_1), DAK (X_2), DBH (X_3) serta pengaruh secara tidak langsung variabel Belanja Langsung (Y_1) terhadap variabel endogen Pertumbuhan Ekonomi (Y_2) dengan galat ϵ_2 . Setelah diperoleh koefisien regresi berganda, selanjutnya hasil koefisien variabel eksogen yang berpengaruh terhadap variabel endogen dicari hasil pengaruh secara langsung dan tidak langsungnya. Kemudian koefisien masing-masing variabel yang pengaruh secara langsung dikali koefisien variabel pengaruh secara tidak langsung. Hasilnya perkalian dijumlahkan, agar diperoleh pengaruh secara total.

HASIL DAN PEMBAHASAN

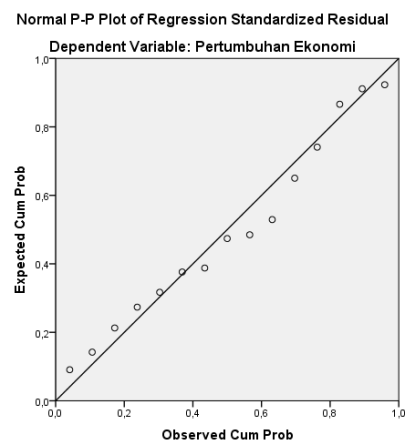
Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji normalitas terlihat pada Gambar 2 dan 3. mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal, dimana sebaran data berada disekitar garis diagonal. Berdasarkan pada grafik histogram normal probabiliti, menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak dipakai dalam penelitian karena memenuhi asumsi normalitas.

Persamaan Struktural I



Persamaan Struktural II



Sumber : Data diolah (SPSS 20)

Gambar 2 dan 3. Grafik Histogram Normalitas Persamaan Struktural I dan II

Hasil Uji Multikolonieritas

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas persamaan struktural I di bawah, dapat dilihat bahwa tidak adanya korelasi yang cukup tinggi atau kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari variabel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolonieritas diantara variabel bebas. Sedangkan pada Persamaan Struktural II, dapat dilihat bahwa tidak adanya korelasi yang cukup tinggi atau kuat antara sesama variabel bebas, dimana nilai VIF dari variabel bebas lebih kecil dari 10 dan dapat disimpulkan tidak terdapat multikolonieritas diantara variabel bebas.

Tabel 3. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Persamaan Struktural I

Variabel	Tolerance	VIF	Keputusan
Pendapatan Asli Daerah	0,287	3,562	Bebas multikolonieritas
Belanja Modal	0,170	5,898	Bebas multikolonieritas
Investasi	0,159	6,290	Bebas multikolonieritas

Sumber : Data diolah (SPSS 20)

Tabel 4. Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Persamaan Struktural II

Variabel	Tolerance	VIF	Keputusan
Pendapatan Asli Daerah	0,209	4,779	Bebas multikolonieritas
Belanja Modal	0,111	9,037	Bebas multikolonieritas
Investasi	0,158	6,332	Bebas multikolonieritas
Kesempatan Kerja	0,104	9,632	Bebas Multikolinieritas

Sumber : Data diolah (SPSS 20)

Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan Struktural I dan II Analisis Korelasi Persamaan Struktural I dan II

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di bawah, maka dapat diketahui bahwa:

1. Nilai korelasi antara PAD (X1) dengan DAK (X2) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,821 dengan arah positif dan signifikan ($0,000 < 0,05$)
2. Nilai koefisien antara PAD (X1) dengan DBH (X3) mempunyai hubungan yang kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,833 dengan arah positif dan signifikan ($0,000 < 0,05$)
3. Nilai koefisien korelasi PAD (X1) dengan Belanja Langsung (Y1) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,879 dengan arah positif dan signifikan ($0,000 < 0,05$)
4. Nilai koefisien antara DAK (X2) dengan DBH (X3) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,903 dengan arah positif dan signifikan ($0,000 < 0,05$)
5. Nilai koefisien antara DAK (X2) dengan Belanja Langsung (Y1) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,922 dengan arah positif dan signifikan ($0,000 < 0,05$)

6. Nilai koefisien antara DBH (X3) dengan Belanja Langsung (Y1) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,877 dengan arah positif dan signifikan ($0,000 < 0,05$)

Tabel 5. Hasil Uji Korelasi Persamaan Struktural I dan II

		PAD	BM	INV	KK	PE
PAD	Pearson Correlation	1	,863**	,501	,836**	,564*
	Sig. (2-tailed)		,000	,057	,000	,028
	N	15	15	15	15	15
BM	Pearson Correlation	,863**	1	,400	,853**	,699**
	Sig. (2-tailed)	,000		,140	,000	,004
	N	15	15	15	15	15
INV	Pearson Correlation	,501	,400	1	,658**	,628*
	Sig. (2-tailed)	,057	,140		,008	,012
	N	15	15	15	15	15
KK	Pearson Correlation	,836**	,853**	,658**	1	,859**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,008		,000
	N	15	15	15	15	15
PE	Pearson Correlation	,564*	,699**	,628*	,859**	1
	Sig. (2-tailed)	,028	,004	,012	,000	
	N	15	15	15	15	15

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Analisis Regresi, uji statistik F, uji statistik t Persamaan Struktural I

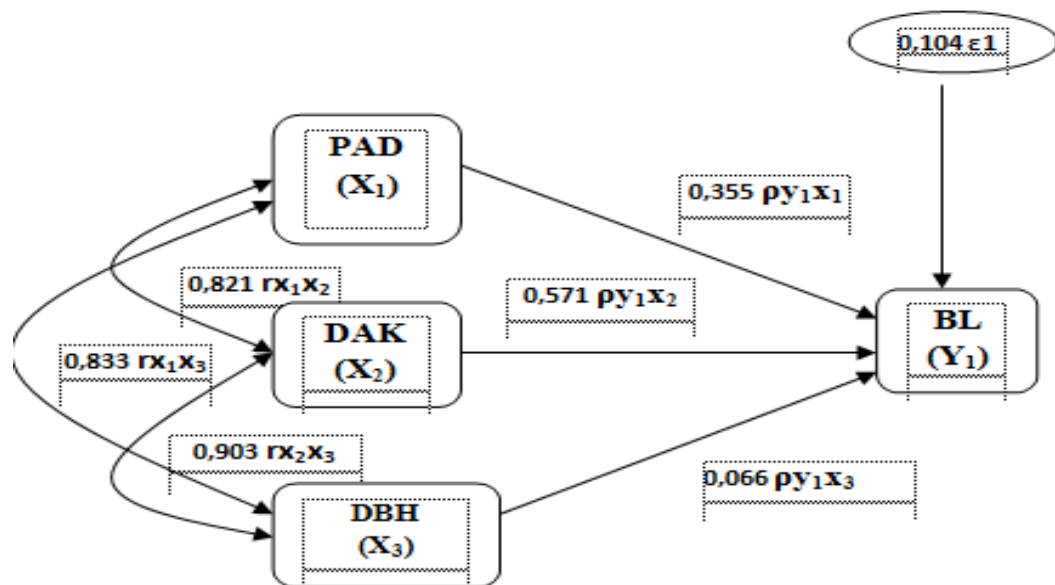
Secara keseluruhan variabel eksogen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel endogen, dengan nilai R² sebesar 89,6 persen. Artinya bahwa PAD, DAK dan DBH mampu mempengaruhi Belanja Langsung di Kabupaten Merangin sebesar 89,6 persen dan sisanya sebesar 10,4 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar model.

Hasil estimasi secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PAD, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung. Sedangkan hasil estimasi secara parsial diketahui DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung sementara PAD dan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Merangin. Hasil estimasi secara parsial yang menyebutkan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja langsung tidak sependapat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nuryanti (2015) bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung, sementara hasil estimasi secara parsial yang menyebutkan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja langsung sependapat dengan hasil penelitian oleh Nuryanti (2015) bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja langsung.

Tabel 6. Ringkasan Hasil Koefisien Jalur Persamaan Struktural I

Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal			Pengaruh Total
	Langsung	Tidak Langsung		
		PAD	DBH	
DAK terhadap Belanja Langsung	32,60	16,65	3,40	52,65

Nilai untuk koefisien PAD adalah 0,355, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel PAD terhadap Belanja Langsung. Artinya, bila terjadi kenaikan PAD sebesar 1 persen maka Belanja Langsung akan meningkat sebesar 0,355 persen. Selanjutnya nilai untuk koefisien DAK adalah 0,571, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel DAK terhadap Belanja Langsung. Artinya, bila terjadi kenaikan DAK sebesar 1 persen maka belanja Belanja Langsung meningkat sebesar 0,571 persen. Sedangkan nilai untuk koefisien DBH adalah 0,066, hal ini menunjukkan ada pengaruh positif antara DBH terhadap Belanja Langsung, artinya jika DBH meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Langsung akan meningkat sebesar 0,066 persen



Gambar 4. Jalur Hubungan Kausal Persamaan Struktural I

Dari gambar 4 dapat dihitung berapa besar pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Adapun variabel eksogen yang bisa dihitung pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan pengaruh total (total effect) adalah variabel eksogen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Hasil regresi persamaan struktural I membuktikan hanya DAK yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung dengan hasil signifikansi $0,034 < 0,05$.

Tabel 7. Pengaruh Kausal Persamaan Struktural I

Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal			Pengaruh Total
	Langsung	Tidak Langsung		
		PAD	DBH	
DAK terhadap Belanja Langsung	32,60	16,65	3,40	52,65

Diketahui bahwa bahwa persamaan struktural I mengandung makna bahwa besarnya kontribusi DAK yang berpengaruh secara langsung terhadap Belanja Langsung sebesar 32,60 persen, pengaruh tidak langsung DAK yang berkontribusi terhadap Belanja Langsung melalui

PAD sebesar 16,65 persen dan melalui DBH hanya sebesar 3,40 persen, sedangkan pengaruh totalnya sebesar 52,65 persen.

Analisis Regresi, uji statistik F, uji statistik t Persamaan Struktural II Hasil Pengujian Hipotesis Persamaan Struktural II

Berdasarkan hasil uji statistik F di Tabel 8 yang terdiri dari PAD (X1), DAK (X2), DBH (X3) dan Belanja Langsung (Y1) sebagai variabel eksogen serta pertumbuhan ekonomi (Y2) sebagai variabel endogen, menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel eksogen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel endogen, dengan nilai R² sebesar 86,3 persen. Artinya bahwa PAD, DAK, DBH dan Belanja Langsung di Kabupaten Merangin mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebesar 86,3 persen dan sisanya sebesar 13,7 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel diluar model.

Hasil estimasi secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel PAD, DAK, DBH dan Belanja Langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan hasil estimasi secara parsial diketahui DAK, DBH dan belanja langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin. Hasil estimasi secara parsial tersebut tidak sependapat dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bati (2009) bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Koefisien Jalur Persamaan Struktural II

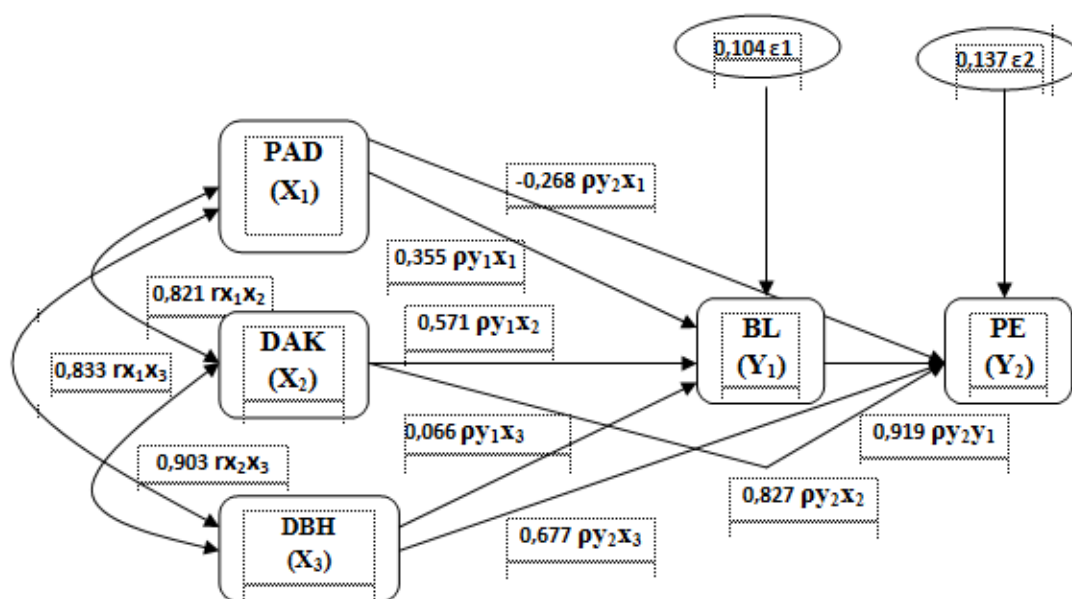
Pengaruh Variabel	Antar	Koefisien Jalur (Beta)	t Sig.	F Sig.	Hasil Pengujian	R ²	py2€2
PAD →	PE	-0,268	0,319	0,000	Ho diterima	0,863	0,137 atau
DAK →	PE	0,827	0,040		Ho ditolak	atau	13,7%
DBH →	PE	0,677	0,044		Ho ditolak	86,3%	
BL →	PE	0,919	0,030		Ho ditolak		

Sumber : Data diolah (SPSS 20)

Nilai untuk koefisien PAD adalah -0,268, hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif antara variabel PAD terhadap pertumbuhan. Artinya, bila terjadi kenaikan PAD 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar -0,268 persen, seharusnya jika PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat namun sebaliknya pertumbuhan ekonomi menurun. Hal ini terjadi dikarenakan PAD di Kabupaten Merangin masih sangat rendah sehingga tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya nilai untuk koefisien DAK adalah 0,827, hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, bila terjadi kenaikan DAK sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,827 persen.

Selanjutnya nilai untuk koefisien DBH adalah 0,677, hal ini menunjukkan ada pengaruh positif antara DBH terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya jika DBH meningkat sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,677 persen. Sedangkan nilai untuk koefisien belanja langsung sebesar 0,919, hal ini menunjukkan ada pengaruh positif

antara belanja langsung dengan pertumbuhan ekonomi, artinya jika belanja langsung meningkat 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,270.



Gambar 5. Jalur Hubungan Kausal Persamaan Struktural II

Dari gambar 5 dapat dihitung berapa besar pengaruh langsung maupun tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Adapun variabel eksogen yang bisa dihitung pengaruh langsung (direct effect), pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan pengaruh total (total effect) adalah variabel eksogen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Hasil regresi persamaan struktural II membuktikan DAK, DBH dan belanja langsung yang berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 9. Pengaruh Kausal Persamaan Struktural II

Pengaruh Variabel	Pengaruh Kausal		Pengaruh Total
	Langsung	Tidak Langsung Belanja Langsung	
DAK $\rightarrow$ PE	68,39	43,39	111,78
DBH $\rightarrow$ PE	45,83	4,11	49,94
BL $\rightarrow$ PE	84,45	-	84,45

Sumber : Data Diolah

Dari tabel 9. diketahui bahwa besarnya kontribusi DAK yang berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 68,39 persen, sementara pengaruh tidak langsung DAK yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Belanja Langsung sebesar 43,39 persen, sedangkan pengaruh totalnya sebesar 111,78 persen. Selanjutnya dapat kita lihat besarnya kontribusi DBH yang berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 45,83 persen, sementara pengaruh tidak langsung DBH yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung sebesar 4,11 persen, sedangkan

pengaruh totalnya sebesar 49,94persen. Terakhir dapat kita lihat besarnya kontribusi belanja langsung yang berpengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 84,45 persen.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh PAD, DAK dan DBH terhadap belanja langsung di Kabupaten Merangin dapat disimpulkan yang mampu mempengaruhi belanja langsung adalah variabel DAK, sementara PAD dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja langsung. DAK mempunyai pengaruh yang positif terhadap belanja langsung. Secara langsung DAK dapat memberikan pengaruh besar dan positif terhadap belanja langsung, sementara bila dilihat pengaruh secara tidak langsung DAK terhadap belanja langsung melalui PAD dan DBH dapat berpengaruh positif namun pengaruhnya lebih kecil dibandingkan pengaruh langsung DAK terhadap belanja langsung di Kabupaten Merangin.

2. Pengaruh PAD, DAK dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung di Kabupaten Merangin dapat disimpulkan yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung adalah variabel DAK dan DBH, sementara PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK, DBH dan belanja langsung mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara langsung DAK, DBH dan belanja langsung mempunyai pengaruh besar dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara bila dilihat pengaruh secara tidak langsung DAK dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja langsung lebih kecil pengaruhnya dibandingkan pengaruh langsung DAK dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan data sekunder. Penelitian kualitatif berpotensi bias tanpa adanya triangulasi data yang memadai. Penelitian ini telah menerapkan triangulasi data melalui pengumpulan data sekunder dari sumber yang berbeda dan observasi. Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan proses triangulasi data yang lebih luas termasuk pada triangulasi metode analisis.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis selama tahun 2001-2015 menunjukkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi belanja langsung di Kabupaten Merangin adalah variabel DAK, sedangkan variabel PAD dan DBH tidak memberikan pengaruh terhadap belanja langsung. Sementara pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh variabel DAK, DBH dan belanja langsung sedangkan PAD, tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin. Hasil ini memerlukan kebijakan diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan realisasi belanja langsung, maka pemerintah Kabupaten Merangin harus mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dan memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai amanat undang-undang, serta visi, misi dan program kepala daerah Kabupaten Merangin.

2. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah Kabupaten Merangin harus mengoptimalkan penerimaan daerah dari pusat yaitu DAK dan DBH serta belanja langsung agar penggunaanya tepat sasaran dan lebih memihak ke sektor publik agar peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Abdullah Syukriydan Abdul Halim (2006). "Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan". *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2No.2 Hal 17-32
- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. (2004). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah".
- Andirfa, Mulia. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh*.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bati. 2009. Pengaruh Belanja Modal Sebagai Komponen Belanja Langsung dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (studi kasus pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara). Skripsi FEUSU (tidak dipublikasikan).
- BPS. 2015. *Jambi Dalam Angka*. Jambi: Badan Pusat Statistik, Jambi.
- Dajan, A, 1993. *Pengantar Metode Statistik Jilid I*, LP3ES, Jakarta.
- DarwantodanYuliaYustikasari. (2007). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". Simposium Nasional Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08 No. 01. February 2007. BPFE UGM. Yogyakarta
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Gultom. Lamria. 2012. Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi Periode 2000-2010. Skripsi FE UNJA (tidak dipublikasikan).
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Hari Adi, Priyo. 2006. "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah". Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Hasanudin, M. 2010. *Kajian Ekonomi Regional Propinsi Jambi Tahun 2010*. Jambi: BI Seksi Statistik Dan Kajian Ekonomi Moneter

- Ihya'ul Ulum. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press
- Kesit Bambang Prakosa. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan pendapatan Asli Daerah (Study Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). Desember: Yogyakarta
- Mahmudi.(2006). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta:Andi
- Mustaqim. 2001. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Jambi: Fakultas Ekonomi UNJA.
- Najiah, Laeni. 2013. Analisis Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Langsung terhadap PDRB di Kota Depok. *Jurnal.ekonomi.pembangunan*. diakses pada 23 Juli 2015
- Nugroho, Bhuono, Agung. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS*, Edisi I. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah republic Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Putro, Nugroho S. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro*
- Rahmadi, Dkk. 2000. Pengaruh Perbedaan Elastisitas Penerimaan Dan elastisitas Pengeluaran Pembangunan terhadap Ketergantungan Bantuan Pembangunan Pusat (studi Kasus Daerah Tkt 1 Jambi Periode 1980-1995). Jambi: Fakultas Ekonomi UNJA.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Siregar, Sofyan. 2012. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Stungkir, Anggiat (2009). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada pemkot/Pemkab Sumatera Utara. Juli. Medan
- Supangat, A, 2007, *Statistika, dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Non Parametrik*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Suparmoko, 2000. *Keuangan Negara Edisi 5*, BPFE, Yogyakarta.
- Suparmoko, M, 2002. *Ekonomi Publik (untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah)*, Andi, Yogyakarta.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonisia
- Yovita, Farah Marta and Utomo, Dwi Cahyo (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008 – 2010). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.